JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Daerah
Vol. 10 No. 1, Juni 2026, Hal. 1-11 | p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v10i1.384

OPTIMALISASI EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BANTEN: ASET, TARIF, DAN LAYANAN PUBLIK

OPTIMIZATION OF EXTENSIFICATION AND INTENSIFICATION STRATEGIES FOR REGIONAL LEVIES IN BANTEN PROVINCE: ASSET UTILIZATION, TARIFF ADJUSTMENT, AND PUBLIC SERVICE IMPROVEMENT

Sabferrial Fernando Imam
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani, Curug, Serang, Banten-Indonesia 42171
yhalpiero14@gmail.com

disubmit: 31 Juli 2025, direvisi: 20 April 2026, diterima: 10 Juni 2026

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian fiskal daerah dalam kerangka desentralisasi. Namun, kontribusi retribusi daerah sebagai komponen utama PAD di Provinsi Banten masih sangat rendah, yaitu hanya 1,5%–2,2% dari total PAD periode 2018–2022. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi optimalisasi retribusi daerah melalui pendekatan integratif yang mencakup tiga dimensi: ekstensifikasi berbasis pemanfaatan aset, intensifikasi melalui penyesuaian tarif, dan peningkatan kualitas layanan publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan campuran (*mixed-methods*) dengan analisis data kuantitatif deskriptif serta wawancara mendalam terhadap 15 informan dari pemerintah daerah dan masyarakat pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 60% aset daerah belum termonetisasi, struktur tarif belum diperbarui secara berkala, serta mutu layanan publik masih rendah akibat kurangnya digitalisasi dan transparansi. Penelitian ini menawarkan kerangka kebijakan yang mencakup digitalisasi basis data aset, reformulasi tarif berbasis prinsip keekonomian, transformasi layanan publik melalui sistem daring, serta penguatan koordinasi kelembagaan dan kapasitas SDM. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat efektivitas fiskal daerah, tetapi juga mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban retribusi. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi simultan tiga dimensi strategis tersebut dalam satu model kebijakan fiskal yang adaptif dan berbasis bukti. Temuan ini memberikan kontribusi empiris dan konseptual bagi pengembangan literatur fiskal daerah serta implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja PAD secara berkelanjutan.

Kata kunci: Desentralisasi fiskal, retribusi daerah, kualitas layanan publik, pemanfaatan aset, reformasi tarif,

ABSTRACT

Local Own-Source Revenue (PAD) is essential for strengthening fiscal independence under decentralization, yet the contribution of local retribution in Banten Province remains minimal at only 1.5%–2.2% of PAD during 2018–2022. This study develops an integrative strategy for optimizing local retribution through three dimensions: asset-based extensification, tariff adjustment, and improved public service quality. Using a mixed-methods approach, it combines

Imam, S. F. (2026). Optimalisasi ekstensifikasi dan intensifikasi retribusi daerah Provinsi Banten: Aset, tarif, dan layanan publik. Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, 10(1), 1-11.
https://doi.org/10.56945/jkpd.v10i1.384
© The Author(s)

Published by Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

descriptive quantitative analysis with in-depth interviews of 15 informants from government and service users. Results show that over 60% of regional assets remain underutilized, tariff structures lack regular adjustment, and service quality is constrained by limited digitalization and transparency. To address these gaps, the study proposes a policy framework centered on digitalizing asset databases, reformulating tariffs on economic principles, transforming service delivery via online systems, and strengthening institutional coordination and human resource capacity. This integrated model enhances fiscal effectiveness while fostering public compliance with retribution obligations. The novelty lies in simultaneously incorporating three strategic dimensions into a single adaptive and evidence-based fiscal policy framework. The findings provide both empirical and conceptual contributions to regional fiscal literature and offer practical insights for improving sustainable PAD performance.

Keywords: *local retribution, asset utilization, tariff reform, public service quality, fiscal decentralization*

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan instrumen vital dalam mendukung kemandirian fiskal pemerintah daerah, terutama dalam konteks desentralisasi fiskal yang mendorong otonomi daerah untuk menggali potensi sumber pendapatannya sendiri. Salah satu komponen utama PAD adalah retribusi daerah, yaitu pungutan atas jasa atau pemanfaatan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Meski demikian, kontribusi retribusi daerah terhadap total PAD di sebagian besar provinsi di Indonesia masih relatif rendah. Di Provinsi Banten, proporsi retribusi daerah terhadap PAD selama lima tahun terakhir cenderung stagnan di bawah 10% (Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa potensi retribusi belum tergarap secara optimal, baik dari sisi cakupan objek retribusi maupun pengelolaannya.

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen utama dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan layanan publik (Masyruroh, 2021). Dalam konteks otonomi daerah, penguatan kapasitas fiskal lokal menjadi esensial guna mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat dan mendorong kemandirian fiskal. Namun, kontribusi retribusi terhadap PAD di Provinsi Banten masih tergolong rendah. Total PAD Provinsi Banten pada tahun 2022 mencapai Rp4,37 triliun atau 49,6% dari total pendapatan daerah, sedangkan kontribusi dari retribusi daerah hanya sekitar 1,95%. Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih mendominasi dengan kontribusi sebesar 50,35% dari total pendapatan, mencerminkan ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat (BPS Provinsi Banten, 2023).

Rendahnya kontribusi retribusi daerah mencerminkan belum optimalnya pengelolaan potensi yang dimiliki.

Vol. 10 No. 1, Juni 2026, Hal. 1-11 | p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v10i1.384

Permasalahan yang sering dijumpai mencakup keterbatasan data objek dan subjek retribusi, tarif retribusi yang tidak sesuai dengan nilai keekonomian layanan, serta rendahnya kualitas pelayanan publik yang berdampak pada tingkat kepatuhan pembayaran. Selain itu, aset daerah yang berpotensi sebagai sumber retribusi masih banyak yang belum dimanfaatkan secara produktif dan sistematis. Rendahnya produktivitas aset daerah secara signifikan menurunkan kontribusinya terhadap PAD (Toha et al., 2025). Pentingnya transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik untuk meningkatkan kepatuhan wajib retribusi (Zulfiqar et al., 2024).

Meskipun berbagai studi sebelumnya telah mengangkat isu-isu terkait pengelolaan retribusi, sebagian besar penelitian tersebut hanya memfokuskan pada satu dimensi, seperti penyesuaian tarif (Zulfiqar et al., 2024), efektivitas pemungutan (Ervina & Hidayah, 2024), atau pemanfaatan aset (Tirayoh et al., 2021). Masih sangat terbatas penelitian yang mengintegrasikan ketiga aspek utama secara simultan yaitu aset, tarif, dan layanan publik padahal ketiganya saling terkait dalam menciptakan sistem retribusi yang efisien dan berkelanjutan. Ketiadaan pendekatan komprehensif tersebut menjadi kendala utama dalam penyusunan strategi kebijakan fiskal daerah yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun strategi optimalisasi retribusi daerah di Provinsi Banten melalui pendekatan integratif yang mencakup tiga dimensi strategis: (1) ekstensifikasi melalui pemetaan aset dan objek retribusi baru, (2) intensifikasi melalui penyesuaian tarif berbasis prinsip cost-recovery dan benchmarking antar daerah, serta (3) peningkatan kualitas layanan publik melalui digitalisasi dan akuntabilitas. Dengan memanfaatkan data primer dari pemerintah daerah serta literatur ilmiah terkini, studi ini berupaya menyusun model kebijakan fiskal daerah yang kontekstual, aplikatif, dan berorientasi pada peningkatan kinerja PAD secara berkelanjutan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka kebijakan retribusi yang menggabungkan dimensi aset, tarif, dan layanan publik secara simultan, yang selama ini belum banyak diadopsi dalam kajian akademik maupun praktik kebijakan fiskal lokal. Selain memberikan kontribusi teoretis terhadap literatur kebijakan fiskal daerah, studi ini juga memiliki implikasi praktis yang kuat bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi penguatan PAD berbasis bukti dan berbasis kontekstual lokal.

Vol. 10 No. 1, Juni 2026, Hal. 1-11 | p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v10i1.384

Desentralisasi fiskal di Indonesia telah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatannya, termasuk retribusi daerah. Retribusi, sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), idealnya mampu mencerminkan kapasitas fiskal suatu daerah dalam membiayai pelayanan publik. Namun, studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa retribusi di banyak daerah, termasuk di Provinsi Banten, masih memberikan kontribusi yang rendah terhadap PAD (Zein et al., 2024). Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti terbatasnya cakupan objek retribusi, tidak efisiennya sistem pemungutan, tarif yang tidak sesuai dengan nilai keekonomian, serta rendahnya kualitas layanan publik yang berdampak pada tingkat kepatuhan masyarakat.

Teori desentralisasi fiskal menekankan pentingnya penguatan pendapatan asli daerah agar tidak terjadi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat (Lewis, 2023). Dalam konteks ini, optimalisasi retribusi daerah dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi mencakup perluasan basis objek retribusi, termasuk melalui pendataan dan pemanfaatan aset daerah yang belum tergarap, sedangkan intensifikasi berkaitan dengan peningkatan tarif secara rasional dan perbaikan dalam tata kelola pelayanan publik.

Berbagai temuan empiris mendukung pentingnya strategi integratif dalam optimalisasi retribusi. Pemanfaatan aset daerah secara produktif memiliki korelasi positif terhadap peningkatan PAD (Tirayoh et al., 2021), terutama ketika dikelola dengan pendekatan berbasis kinerja dan tata kelola yang transparan. Rendahnya produktivitas aset milik daerah menjadi salah satu penghambat utama peningkatan retribusi (Toha et al., 2025). Di sisi lain, kualitas layanan publik juga memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan masyarakat membayar retribusi. Transformasi digital dalam layanan publik dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepercayaan publik, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap penerimaan retribusi (Zulfiqar et al., 2024).

Namun demikian, terdapat kesenjangan dalam literatur yang ada. Sebagian besar studi terdahulu cenderung membahas dimensi-dimensi tersebut secara terpisah. Misalnya, fokus pada efektivitas tarif retribusi pasar tradisional, tanpa mempertimbangkan konteks pengelolaan aset atau kualitas layanan publik secara komprehensif (Purwati et al., 2025). Di sisi lain, studi-studi mengenai pemanfaatan aset daerah belum secara eksplisit mengaitkannya dengan struktur tarif dan kepatuhan wajib retribusi. Keterpisahan ini menyebabkan lemahnya perumusan kebijakan fiskal yang holistik dan terintegrasi di tingkat daerah.

Dengan memperhatikan kekosongan

tersebut, penelitian ini membangun kerangka konseptual yang menggabungkan tiga dimensi utama dalam pengelolaan retribusi daerah: (1) pemanfaatan aset daerah sebagai landasan ekstensifikasi, (2) penyesuaian tarif retribusi sebagai strategi intensifikasi, dan (3) peningkatan kualitas layanan publik sebagai upaya peningkatan kepatuhan masyarakat. Pendekatan ini relevan untuk konteks Provinsi Banten, yang menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan PAD dari sektor retribusi, meskipun memiliki potensi aset dan basis layanan publik yang cukup besar.

Secara konseptual, integrasi ketiga dimensi ini didasarkan pada teori good governance dan pelayanan publik, yang menekankan pentingnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah . Pendekatan ini juga sejalan dengan paradigma evidence-based policy yang menempatkan data dan hasil evaluasi empiris sebagai dasar perumusan kebijakan fiskal yang adaptif dan kontekstual.

Dengan demikian, tinjauan literatur ini menjadi dasar yang kuat bagi penelitian untuk menyusun strategi optimalisasi retribusi daerah yang tidak hanya mengandalkan pendekatan fiskal konvensional, tetapi juga memperhitungkan aspek kelembagaan, tata kelola aset, dan dinamika pelayanan publik dalam satu kerangka kebijakan yang terpadu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed-methods*) dengan desain eksploratif-kualitatif yang diperkuat oleh analisis kuantitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara komprehensif isu-isu strategis dalam optimalisasi retribusi daerah di Provinsi Banten, khususnya terkait pengelolaan aset, struktur tarif, dan kualitas layanan publik. Strategi ini memungkinkan integrasi antara pemahaman mendalam terhadap dinamika kebijakan fiskal daerah dan validasi kuantitatif terhadap data kinerja retribusi dalam kurun lima tahun terakhir (2018–2022). Pendekatan semacam ini dinilai efektif dalam penelitian kebijakan lokal karena mampu menjawab pertanyaan "mengapa" sekaligus "bagaimana" kebijakan dapat dioptimalkan (Robinson, 2007).

Lokasi penelitian ditetapkan di Provinsi Banten dengan unit analisis yang mencakup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengelola retribusi di berbagai sektor seperti pasar, terminal, dan layanan perizinan. Populasi dalam penelitian ini terdiri atas dua kelompok utama, yakni aparatur pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan retribusi, serta masyarakat atau pelaku usaha yang menjadi wajib retribusi. Pemilihan informan kunci dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi dan

kedalaman informasi yang dapat diberikan. Jumlah informan dalam studi ini adalah 15 orang yang terdiri dari pejabat struktural OPD dan perwakilan masyarakat pengguna layanan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (FGD) menggunakan panduan semi-terstruktur yang disusun berdasarkan kerangka teoritis retribusi daerah, manajemen aset, dan kualitas layanan publik.

Panduan tersebut mencakup pertanyaan-pertanyaan mengenai kendala dan potensi ekstensifikasi objek retribusi, rasionalitas struktur tarif, serta persepsi terhadap mutu layanan publikyang diberikan pemerintah daerah.

Untuk mendukung analisis kualitatif, data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi seperti Peraturan Daerah tentang retribusi, laporan realisasi PAD, dan daftar aset daerah. Keabsahan instrumen diuji melalui validasi isi (*content validity*) oleh dua pakar kebijakan publik dan satu pejabat teknis pemerintah daerah. Keandalan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member checking.

Data kualitatif dianalisis menggunakan pendekatan *thematic content analysis* (Kabir,2024), yang meliputi proses koding terbuka, kategorisasi, dan identifikasi tema utama terkait ekstensifikasi, intensifikasi, dan layanan publik. Sementara itu, data kuantitatif yang berasal dari laporan realisasi retribusi daerah dan aset dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi tren capaian dan kontribusi retribusi terhadap PAD. Selain itu, dilakukan analisis perbandingan antar sektor retribusi dan antar kabupaten/kota dalam lingkup Provinsi Banten guna memperoleh gambaran yang lebih holistik tentang variasi kinerja retribusi.

Etika penelitian dijunjung tinggi dalam setiap tahapan studi ini. Seluruh informan dilibatkan secara sukarela melalui penandatanganan persetujuan partisipasi (informed consent), dan identitas mereka dijaga kerahasiaannya. Izin penelitian diperoleh secara resmi dari Pemerintah Provinsi Banten dan instansi terkait. Data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk keperluan akademik dan pengembangan kebijakan fiskal daerah secara profesional dan bertanggung jawab .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi ini menemukan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Provinsi Banten pada periode 2018–2022 sangat rendah, yakni hanya 1,5%–2,2%, meskipun data menunjukkan potensi aset publik yang belum dimaksimalkan mencapai lebih dari 60% dari total inventaris aset. Hanya sekitar 35% aset yang telah termonetisasi sebagai objek retribusi. Di sektor-sektor seperti pasar

tradisional dan terminal, sistem pemungutan masih sangat manual dan data realisasi jauh di bawah target (Purwati et al., 2025).

Analisis kualitatif mengungkap bahwa ekstensifikasi aset terhambat oleh koordinasi lemah antara OPD, keterbatasan SDM, dan sistem pendataan manual yang tidak terintegrasi. Temuan ini konsisten dengan studi Chumairoh et al. (2022) yang menunjukkan manajemen aset publik yang tidak produktif menurunkan kontribusi PAD. Tarif retribusi yang tidak disesuaikan secara berkala seringkali di bawah dasar keekonomian menyebabkan rendahnya intensifikasi retribusi, sesuai dengan hasil Rahman et al. (2024) & Setyawati & Faridatussalam (2023) yang menghubungkan efektivitas tarif dengan kepatuhan masyarakat. Di samping itu, kualitas layanan publik masih buruk, minimnya digitalisasi dan transparansi menghambat kepatuhan publik, seperti yang ditekankan oleh Aswan et al. (2024) dalam konteks layanan fiskal daerah.

Berdasarkan teori desentralisasi fiskal (Bird, 2018; Ginanjar et al., 2025), kontribusi rendah retribusi menandakan adanya "*flypaper effect*", yakni ketergantungan tinggi pada dana pusat daripada menggali potensi lokal secara mandiri. Temuan ini memperkuat urgensi pendekatan yang menyinergikan aspek aset, tarif, dan layanan publik dalam satu strategi kebijakan, sebagaimana disarankan oleh (Aswan et al., 2024).

Data empiris dari berbagai daerah Indonesia memperkuat temuan ini. Studi di Purworejo menunjukkan kontribusi retribusi pasar tradisional hanya ≈ 5% meski meningkat sejak revitalisasi aset dan promosi digital (Rahman et al., 2024). Tarif yang relevan memengaruhi efektivitas penerimaan retribusi (Mulyono & Survival, 2023). Distribusi antar sektor layanan retribusi non-pasar juga memiliki kontribusi positif terhadap PAD pada studi (Setyawati & Faridatussalam, 2023).

Secara ilmiah, hasil penelitian ini memperkuat literatur yang menghubungkan penyesuaian tarif (Zulfiqar et al., 2024), efektivitas pemungutan (Ervina & Hidayah, 2024), atau pemanfaatan aset (Tirayoh et al., 2021) dalam membentuk kinerja retribusi pada konteks fiskal lokal. Penelitian ini memperkenalkan pendekatan sinergis tiga-dimensi ekstensifikasi, intensifikasi, dan pelayanan publik yang sebelumnya jarang dijadikan kerangka kebijakan fiskal holistik.

Secara praktis, temuan ini memberikan beberapa rekomendasi kebijakan berbasis bukti:

1. Digitalisasi basis data aset untuk memetakan dan memonetisasi aset daerah secara sistematis. Bahwa digitalisasi data membantu meningkatkan ekstensifikasi retribusi.
2. Penyesuaian tarif retribusi berbasis cost-recovery dan benchmark antar daerah, agar tarif mencerminkan nilai ekonomis

dan daya beli lokal, seperti struktur tarif.

3. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sistem pembayaran digital, transparansi prosedural, dan akses informasi yang mudah.
4. Penguatan koordinasi lintas OPD dan kapasitas SDM, dengan pembentukan unit pengelola retribusi terpadu dan pelatihan teknis serta insentif kinerja.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data kuantitatif bersifat sekunder dan tersedia terbatas pada agregasi OPD, sehingga potensi bias atau ketidaktepatan tidak bisa dihindari. Kedua, jumlah informan kunci yang terbatas (15–20 orang) mungkin belum sepenuhnya mencerminkan beragam persepsi stakeholder. Ketiga, analisis kuantitatif masih bersifat deskriptif, belum menggunakan model inferensial seperti regresi panel atau SEM yang bisa menguji hubungan kausal antar variabel.

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dan konseptual yang signifikan pada pengembangan ilmu administrasi publik dan fiskal daerah. Dengan menggunakan data dari Provinsi Banten sebagai studi kasus, penelitian ini menambah literatur lokal yang sebelumnya lebih banyak bersifat lintas-daerah atau sektoral. Pendekatan integratif menggabungkan aset, tarif, dan layanan publik menawarkan model kebijakan fiskal daerah yang adaptif, evidence- based, dan berorientasi pada hasil yang dapat diadaptasi oleh daerah lain dengan karakteristik serupa. yang bersifat adaptif dan berbasis bukti, dengan menekankan digitalisasi basis data aset, reformulasi tarif sesuai prinsip keekonomian dan daya beli.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten masih sangat rendah, meskipun terdapat potensi aset publik yang besar dan belum dimonetisasi secara optimal. Hasil temuan menunjukkan adanya permasalahan struktural berupa lemahnya koordinasi antar-OPD, keterbatasan kapasitas SDM, serta sistem pendataan manual yang menghambat ekstensifikasi aset. Selain itu, struktur tarif yang tidak diperbarui secara berkala mengurangi efektivitas intensifikasi, sementara kualitas layanan publik yang rendah akibat minimnya digitalisasi dan transparansi berdampak pada rendahnya kepatuhan masyarakat.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat literatur mengenai pentingnya integrasi antara pemanfaatan aset, reformasi tarif, dan peningkatan layanan publik dalam kerangka desentralisasi fiskal. Secara praktis, penelitian ini menawarkan model kebijakan fiskal daerah yang mengintegrasikan optimalisasi pemanfaatan aset publik, reformulasi tarif berbasis prinsip keekonomian, peningkatan kepatuhan

masyarakat, transformasi layanan berbasis digital yang transparan, serta penguatan koordinasi kelembagaan dan kapasitas SDM.

Meskipun memiliki keterbatasan pada penggunaan data sekunder agregat dan jumlah informan yang terbatas, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dan konseptual yang signifikan bagi pengembangan strategi optimalisasi retribusi daerah. Implikasi kebijakan yang ditawarkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Banten dan wilayah lain dengan karakteristik serupa, dalam meningkatkan kinerja PAD secara berkelanjutan.

Rekomendasi

Berdasarkan simpulan di atas, berikut adalah rekomendasi kebijakan dan praktik implementatif yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah daerah lain yang memiliki karakteristik serupa:

1. Penguatan sistem pendataan dan digitalisasi aset daerah. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem informasi aset berbasis teknologi digital dan spasial (GIS) yang terintegrasi dengan sistem retribusi daerah. Sistem ini harus mampu mencatat, memetakan, dan memonitor pemanfaatan seluruh aset daerah secara real-time untuk mendukung

   strategi ekstensifikasi retribusi yang lebih akurat dan terukur.
2. Reformulasi struktur tarif retribusi secara berkala dan berbasis analisis keekonomian. Peninjauan tarif retribusi harus dilakukan secara periodik dengan mempertimbangkan prinsip *cost-recovery*, beban pelayanan, dan kemampuan membayar masyarakat. Benchmarking dengan tarif di daerah lain yang sebanding juga dapat menjadi acuan dalam menentukan kebijakan tarif yang adil dan efisien.
3. Modernisasi layanan publik melalui digitalisasi dan simplifikasi prosedur. Optimalisasi retribusi tidak dapat dipisahkan dari mutu layanan publik. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi digital pada layanan perizinan, pembayaran retribusi, dan system informasi publik guna meningkatkan transparansi, efisiensi, serta kepuasan masyarakat. Hal ini juga berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib retribusi.
4. Penguatan koordinasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM. Pemerintah daerah perlu membentuk satuan kerja terpadu lintas-OPD untuk mengelola retribusi secara sinergis dan efektif. Di sisi lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, sertifikasi pengelolaan aset, dan insentif kinerja berbasis capaian retribusi juga sangat diperlukan.
5. Penyusunan *roadmap* kebijakan retribusi jangka menengah dan panjang. Pemerintah daerah perlu menetapkan

arah strategis pengelolaan retribusi daerah dalam bentuk dokumen kebijakan jangka menengah dan panjang yang mencakup target peningkatan objek retribusi, perbaikan struktur tarif, peningkatan layanan, dan indikator evaluasi kinerja. Roadmap ini harus bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional maupun kondisi ekonomi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Akramul Kabir, S. M. (2024). Thematic Analysis: A Practical Guide. *Pasaa Paritat Journal*, *39*, 142–145. https://doi.org/10.58837/CHULA.PPJ.39.8

Aswan, A., Dahham Sabbar, S., Bashir, S., & Ratna Sari Dewi, A. (2024). Linking regional investments and revenues at the provincial level to investment loan decisions by local government banks in Indonesia. Public and Municipal Finance, 13(2), 31–43. https://doi.org/10.21511/pmf.13(2).2024.04

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. (2023). Rencana Strategis 2023-2026.

Bird, A. (2018). Taxation and executive compensation: Evidence from stock options. Journal of Financial Economics, 127(2), 285–302. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2017.11.006

BPS Provinsi Banten. (2023). Provinsi Banten Dalam Angka 2023. https://banten.bps.go.id.

Chumairoh, D., Andi, & Mukhtar. (2022). Effect of Local Tax, Local Retribution, Restricted local assets Management, and General Allocation Funds on Regency and Municipal Capital Expenditures in Banten Province. Management Science Research Journal, 1(2), 30–42. https://doi.org/10.56548/msr.v1i2.17

Ervina, E., & Hidayah, N. (2024). The Influence Of Local Taxes And Local Retributions On Regional Expenditure Through Local Own-Source Revenue As A Mediating Variable During The Pandemic Period(Empirical Study In Cities/Districts In West Java). Devotion : Journal of Research and Community Service, 5(2), 303–317. https://doi.org/10.59188/devotion.v5i2.690

Ginanjar, R. A. F., Sutjipto, H., Sugiyarto, & Basuki Rahmat. (2025). Analysis of the Impact of Fiscal Decentralization on Regional Fiscal Imbalances: A Cross-Region Case Study in Java. Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 10(1), 39–52. https://doi.org/10.33105/itrev.v10i1.1131

Lewis, B. D. (2023). Indonesia's New Fiscal Decentralisation Law: A Critical Assessment. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 59(1), 1–28. https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2180838

Masyruroh, A. M. (2021). Pengaruh Potensi Penerimaan Pajak dan Retribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Serang. Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, 5(1), 34–46. https://doi.org/10.56945/jkpd.v5i1.116

Mulyono, & Survival. (2023). Market Retribution Market Potential Analysis in Malang City. Journal of Management Research and Studies, 1(2), 297–311. https://doi.org/10.61665/jmrs.v1i2.46

Purwati, E., Sufilah, N., Hidayat, Moh. T., & Bharoto, R. M. H. (2025). Market Retribution: Optimization Of Regional Original Revenue In Cirebon City. Interdiciplinary Journal and Hummanity (INJURITY), 4(7), 491–504. https://doi.org/10.58631/injurity.v4i7.1

458

Rahman, A., Nur Fauziya, A., & Kurnia Sari3, T. (2024). Strategies For Optimizing Traditional Market Retribution: A Study In Purworejo Regency. International Journal Of Community Service, 4(1), 1–8. https://doi.org/10.51601/ijcs.v4i1.246

Robinson, P. (2007). Designing and Conducting Mixed Methods Research. Australian and New Zealand Journal of Public Health, 31(4), 388. https://doi.org/10.1111/j.1753-6405.2007.00096.x

Setyawati, R., & Faridatussalam, S. R. (2023). Determinant Analysis of Local Retribution on Local Revenue. Economic Journal, 12, 2023. http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi

Tirayoh, V. Z., Latjandu, L. D., Sabijono, H., & Mintardjo, C. M. O. (2021). Public Sector Asset Management in the Government of Indonesia: A Case Study in Minahasa Regency. Jurnal Bina Praja, 13(2), 195–205. https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.195-205

Toha, S. N., Ghiffari, A., & Irzal, F. (2025). Optimization Strategies for Government Asset Management in Jakarta Using Multi-Criteria Analysis. Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan, 13(1), 247–256. https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i1.2974

Zein, M. H. M., Muhtarom, M. M., Mulyadi, M. M., & Septiani, S. (2024). Examining the Role of Local Government's Financial Performance and Capital Expenditure in Increasing Economic Growth in Banten Province, Indonesia (2018–2022). Journal of Risk and Financial Management, 17(10), 456. https://doi.org/10.3390/jrfm17100456

Zulfiqar, F. L., Silvia, T., & Abrori, A. (2024). Digital Transformation and Sustainable Local Tax System Practices in Emerging Market: A Qualitative Analysis. Journal of Advances in Accounting, Economics, and Management, 2(2), 12. https://doi.org/10.47134/aaem.v2i2.510